

TRANSFER DANA DESA DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA

Village Fund Transfers and Imbalance of Income Distribution in Indonesia

Muh. Amir Arham

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

email: amier_archam@yahoo.com

Yusrin Hasan

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

email: yusrinhasans@gmail.com

Abstrak

Desa merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan di Indonesia, selama puluhan tahun wilayah ini cenderung kurang diperhatikan dalam hal alokasi anggaran untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Akibatnya ketimpangan antar kota – desa makin melebar, selain itu dinamika kemajuan ekonomi perkotaan terus meningkat di waktu yang bersamaan kondisi perdesaan cenderung makin terbelakang. Sehubungan hal tersebut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa lahir dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan. Selanjutnya studi ini dilakukan dengan tujuan ingin melihat sejauh mana pengaruh Dana Desa (DD) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia selama periode dilakukannya transfer Dana Desa. Metode yang digunakan adalah analisis ekonometrika dengan persamaan data panel melalui pendekatan *fix effect model*, untuk 33 provinsi pada periode tahun 2015 – 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah meningkatkan transfer dana desa maka akan mendorong penurunan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Key Word: Dana Desa dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Abstract

The village is the entry-point of government services in Indonesia, these region were tended to be under-paid in terms of budget allocations for governance and development almost for decades. As a result, imbalance between cities and villages is getting widening, besides the dynamics of urban economic progress continue to increase at the same time rural conditions tend to be more retarded. Concerning with national constitution UU No. 6/ 2014 About the Village was declared in order to accelerate rural development. Furthermore, the object of these studies were addressed how far the influence of the Village Fund (DD) on imbalance of income distribution across provinces in Indonesia during the period of Village Fund transfers. The method used is econometric analysis with panel data equation through fix effect model approach, for 33 provinces during 2015 - 2016. The result of research indicate that Village Fund transfers have negative and significant effect to imbalance in Indonesia, in this case it can be concluded that every government increase fund transfer Villages will make income imbalance getting down in Indonesia.

Key Word: Village Funds and Imbalance Revenue Distribution

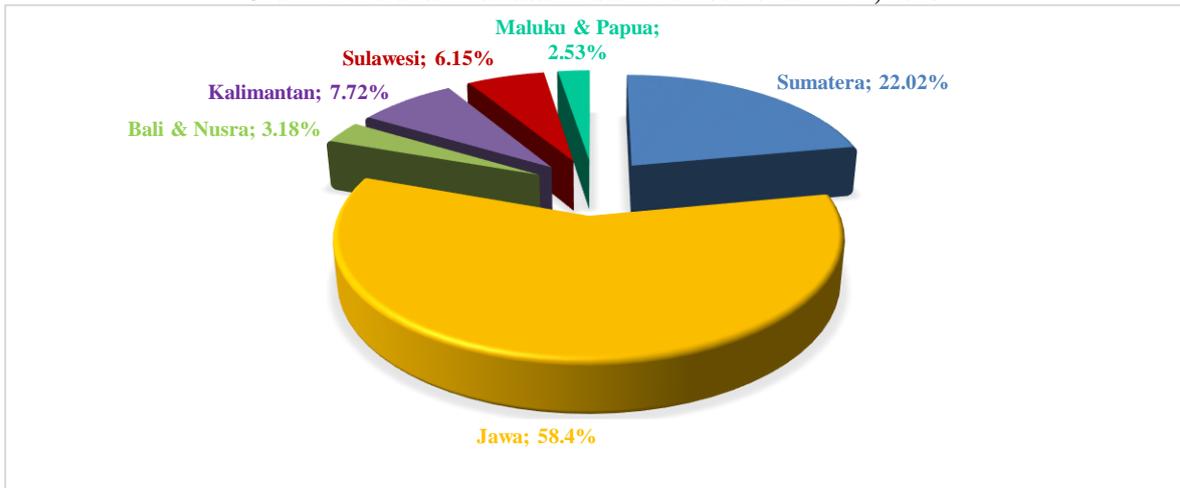
PENDAHULUAN

Tantangan terberat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dalam pembangunan ekonomi, yakni ketimpangan. Jika dilakukan pembagian masalah ketimpangan, maka ada dua hal pokok yang dilihat diantaranya ketimpangan antar kawasan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Sekalipun demikian, bahwa ketimpangan sesungguhnya masalah universal yang pernah dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Berbagai studi empiris dan literatur ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa pada awalnya proses pembangunan kecenderungan terjadi ketimpangan, namun lama kelamaan kondisi ketimpangan menurun.

Oleh sebab itu ketimpangan merupakan masalah klasik ekonomi, tetapi membutuhkan keseriusan untuk mengatasinya, sebab jika dibiarkan begitu saja maka akan menimbulkan dampak sosial. Ketimpangan antar kawasan dan distribusi pendapatan seringkali menjadi pemicu pertentangan antar kelompok masyarakat, serta dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Melihat fenomena tersebut *World Bank* membuat program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2015 yang berfokus pada 10 Butir. Butir kesepuluh dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mengurangi ketimpangan.

Di Indonesia sendiri diyakini bahwa faktor utama pendorong tingginya ketimpangan antar kawasan dan distribusi pendapatan karena selama puluhan tahun arah kebijakan pembangunan ekonomi terlalu menekankan efisiensi sehingga kegiatan ekonomi makin terkonsentrasi di dua kawasan (pulau) Sumatera dan Jawa, dan bilamana diakumulasi peran kedua pulau tersebut terhadap pembentukan ekonomi nasional menyumbang sekitar 80 persen, sementara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya sekitar 20 persen saja. Akibatnya pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja yang efisien secara ekonomi, jika dipetakan perkawasan dimana pembentukan ekonomi secara nasional sangat didominasi oleh dua kawasan, yakni Pulau Sumatera dan Jawa kedua kawasan (pulau) tersebut berada di belahan barat Indonesia, sementara Kawasan Timur Indonesia kontribusinya sangat sedikit sebagaimana terlihat pada gambar 1 di bawah ini.

Grafik 1: Peranan Kawasan Dalam Pembentukan PDB, 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016. (Diolah).

Berdasarkan data di atas menggambarkan dimana Pulau Jawa kontribusinya terhadap pembentukan ekonomi nasional sebesar 58, persen, Sumatera menyumbang sebesar 22,02 persen, sedangkan di KTI termasuk didalamnya adalah Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua masing-masing menyumbang di bawah 10 persen.

Sementara tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, namun beberapa provinsi masih tinggi. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Rati, nilai Gini Ratio antara 0 – 1. Secara nasional Gini ratio Indonesia tahun 2010 tercatat sebesar 0,378 dan meningkat menjadi 0,410 pada tahun 2011, namun mengalami penurunan pada September 2011 sebesar 0,388. Pada periode Maret 2012 hingga September 2014 Gini ratio mengalami fluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2014 sebesar 0,414. Pada Maret 2015 Gini ratio mulai turun menjadi 0,408 dan terus menurun hingga mencapai 0,394 pada September 2016, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 2: Perkembangan Gini Ratio Indonesia Tahun 2010 - 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016. (Diolah).

Berbagai terobosan yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong penurunan ketimpangan kawasan nampaknya belum membuahkan hasil. Salah satu model kebijakan yang diyakini dapat mengurangi ketimpangan adalah kebijakan desentralisasi fiskal. Selama 16 tahun lebih kebijakan ini berjalan, kondisinya tidak jauh berbeda pada masa Orde Baru, ketimpangan tetap tinggi sebagaimana digambarkan beberapa penelitian diantaranya, Waluyo (2007:1), Nugrahanto dan Muhyiddin (2008:1), Widhiyanto (2008a:19), Suwanan dan Sulistiani (2009a:328) kesimpulannya secara umum sama bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dalam bentuk transfer belum mampu mengurangi ketimpangan. Temuan tersebut sejalan dengan beberapa penelitian serupa yang dilakukan di negara lain, diantaranya Bonet (2006:661) di Kolombia, Checerita, Nickel dan Rother (2009:20) di Eropa, Liu, Martinez-Vazquez dan Wu (2014:2) di China, Yeeles (2015:390) di Filipina, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transfer fiskal justru cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Meskipun penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda, seperti yang ditemukan oleh Wardana, Juanda, Siregar dan Wibowo (2013:111), dimana transfer fiskal dapat menurunkan ketimpangan di Indonesia, demikian juga Munoz, Radics dan Bone (2010) di Amerika Latin dan Karibia. Sedangkan Kim dan Samudro (2017:22) dalam studinya menemukan bahwa peningkatan transfer fiskal ke daerah kaya di Indonesia justru meningkatkan ketimpangan dan sebaliknya peningkatan transfer di daerah miskin akan mengurangi ketimpangan.

Bila ditelaah lebih lanjut, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar hasil studi menemukan bahwa dana transfer dampaknya masih minim mendorong perbaikan ketimpangan di Indonesia. Masih minimnya dampak transfer pemerintah beserta kewenangan yang diberikan kepada daerah tidak menjadi insentif mengurangi ketimpangan antar daerah dan wilayah, salah satu penyebabnya karena masih tingginya derajat sentralisasi fiskal (Arham, 2014a). Konsentrasi pembangunan tetap bertumpu di kawasan yang lebih efisien secara ekonomi dan skala ekonominya lebih profitable (Jawa dan Sumatera). Pemberian insentif tentu bisa mendorong kegiatan ekonomi di daerah KTI, tetapi belum maksimal karena dalam implemenasinya tidak berjalan normal diakibatkan banyaknya hambatan, terutama ketersediaan infrastruktur yang minim, bukan hanya di KTI tetapi juga terjadi di daerah lainnya diluar Pulau Jawa, dengan minimnya infrastruktur dapat menciptakan ketimpangan (Azwar, Masbar dan Syahnur, 2013). Ketimpangan antar daerah di suatu negara terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dan faktor produksi yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja (Esteban dan Ray, 2006). Dari 34 provinsi di

Indonesia kurang dari separuh yang memiliki sumber daya, selebihnya minim sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akita (2003:55) melakukan studi dengan membandingkan kondisi ketimpangan di China dan Indonesia, bahwa secara umum ketimpangan pendapatan antardaerah disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi SDA, menurut Zhang (2006) selain faktor sumber daya juga dipengaruhi perbedaan struktur ekonomi yang dapat menjadi penyebab ketimpangan.

Masih tingginya ketimpangan antar kawasan, dan dominannya kawasan Pulau Jawa memberikan peranan terhadap perekonomian nasional salah satu penyebabnya karena pangsa sektor primer (pertanian) masih dominan berkontribusi terhadap PDRB di luar Pulau Jawa, khususnya di KTI. Pada saat yang bersamaan pertumbuhan sektor pertanian yang lambat, sementara sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja, kondisi ini mengakibatkan selain ketimpangan juga berdampak terhadap tingginya angka kemiskinan perdesaan. Makin menyusutnya luas lahan pertanian, serta jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang masih tinggi, kurang memberikan jaminan kehidupan yang layak. Hal ini tercermin hampir keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia angka kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Pada saat yang bersamaan wilayah perkotaan sumber kehidupan lebih variatif, sehingga makin memperkuat "*backwash effect*" ekonomi perkotaan terhadap ekonomi perdesaan. Hanya saja tarikan ekonomi perkotaan menyebabkan masyarakat perkotaan makin kompetitif sementara sebagian para urbanis memiliki keterampilan yang terbatas yang dipersyaratkan bekerja di sektor formal. Bagi masyarakat perkotaan yang memiliki sumber daya dapat mengoptimalkan produktifitas dan kegiatan ekonominya sehingga pendapatannya makin tinggi. Lain halnya para urbanis dan sebagian masyarakat perkotaan input produksinya terbatas mengakibatkan penghasilannya rendah, pada akhirnya makin melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk.

Demikian halnya ketimpangan pembangunan antar wilayah perdesaan dan perkotaan tetap tinggi, malahan ketimpangan semakin melebar. Sumber kehidupan perkotaan makin beragam, pada saat yang sama sumber kehidupan perdesaan terbatas disektor pertanian yang minim nilai tambah. Padahal jumlah desa di Indonesia jauh lebih banya ketimbang wilayah perkotaan (kelurahan), saat ini jumlah desa sebanyak 74,093 dan 8,300 kelurahan tersebar di 34 provinsi. Konsekuensi logisnya pembangunan yang bertumpu pada perkotaan, lahan makin terbatas yang berdampak terhadap makin mahal biaya konstruksi di perkotaan.

Menyadari kondisi pedesaan yang tertinggal, serta model kebijakan selama ini yang kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan desa, maka pemerintah melahirkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut UU ini Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan lahirnya UU tersebut maka memiliki konsekuensi munculnya transfer Dana Desa. Dengan demikian jenis transfer ke daerah bertambah selain Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan ke Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Jika dilihat dari kriteria dan jenis transfer maka transfer Dana Desa (DD) termasuk dalam jenis transfer dengan tujuan umum karena sifatnya *unconditional*. Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaannya bersifat otonom, dimana aparat desa selaku pengelola dana desa diberikan kewenangan dalam hal pemanfaatan (anggaran belanja).

Stimulasi alokasi anggaran ini (transfer dana desa) diasumsikan akan mendorong kegiatan ekonomi pedesaan sekaligus dapat menciptakan dampak ekonomi, sehingga memiliki implikasi yang kuat terhadap penurunan ketimpangan antar desa-kota. Ini sejalan dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Crudu (2015), bahwa kebijakan fiskal seperti transfer Dana Desa salah satu alat yang paling penting bagi pemerintah untuk mempengaruhi distribusi pendapatan, serta berbagai literatur menyebutkan dimana transfer fiskal dapat mendorong perbaikan distribusi pendapatan (Checerita, Nickel dan Rother, 2009b). Sekalipun penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Chen (2012) di China berbeda hasilnya justru dana transfer tidak signifikan memperbaiki ketimpangan, ini tidak lain karena model transfer yang diberlakukan tidak berbasis kebutuhan dan aturan yang ada.

Sekaitan dengan hal tersebut transfer Dana Desa memberikan konsekuensi logis dimana pemerintah desa dituntut untuk menyusun perencanaan dan APBDes sebagai formula untuk mendesain perencanaan secara terstruktur, sebab selama ini pemerintahan desa tidak memiliki perencanaan yang baik, tidak ada penganggaran yang terpola. Akibatnya program yang disusun belum tentu memiliki dampak terhadap kinerja perekonomian desa, termasuk perbaikan ketimpangan. Tidak sedikit desa dalam menyusun perencanaan dan anggaran menemui banyak kendala, khususnya dalam penyusunan program prioritas, apalagi dalam pemanfaatan dana desa harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dalam Permendes PDTT No.

5 Tahun 2015 menegaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin melihat sejauh mana efektifitas transfer dana desa terhadap ketimpangan perdesaan diseluruh provinsi di Indonesia selama tahun 2015 – 2016, dan variabel yang memiliki determinasi paling kuat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

METODE

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *pooled data* yang merupakan kombinasi data *time series* periode 2015 – 2016 dan data *cross section* 33 provinsi di Indonesia, Jakarta tidak dimasukkan sebagai unit analisis karena karakteristik ekonominya berbeda dengan provinsi lainnya, serta Dana Desa hanya satu kabupaten yang mendapatkan. Sumber perolehan data adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Keuangan untuk data Dana Desa (DD) dan Daerah Dalam Angka seluruh Provinsi di Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data makro ekonomi daerah, dan keseluruhan data tersebut merupakan data kuantitatif.

Model Empiris

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelatif, dimana penelitian korelatif untuk mencari keterkaitan hubungan fakta-fakta dalam fenomena yang diteliti kemudian mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena tersebut, seperti variabel-variabel pengaruh Dana Desa dan Perubahan Distribusi Pendapatan di Indonesia. Selanjutnya dikembangkan model dengan mengacu pada studi empirik sebelumnya dengan menggunakan Ketimpangan Distribusi Pendapatan sebagai variabel terikat yang diproksi dari Indeks Gini Ratio dari BPS, sedangkan Dana Desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat sebagai variabel bebas dengan menambah variabel kontrol diantaranya pertumbuhan ekonomi, jumlah populasi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran setiap provinsi. Model transfer Dana

Desa terhadap ketimpangan digunakan dalam studi ini mengadopsi model dasar dari Lessmann (2009), adapun model disusun seperti sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Ineq_{it} = & \delta_0 + \delta_1 Growth_{it} + \delta_2 LnPop_{it} + \delta_3 Pov_{it} + \delta_4 HDI_{it} + \delta_5 Unemp_{it} \\ & + \delta_6 LnDD_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (1)$$

Dimana, INEQ adalah Kesenjangan Distribusi Pendapatan Dikalkulasikan dari Gini Rasio (Indeks); Growth, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi (Persen); POP, Jumlah penduduk (Jiwa); POV, Tingkat Kemiskinan (Persen), HDI; Indeks Pembangunan Manusia (Indeks); UNEMP, Angka Pengangguran (Persen), dan DD, Transfer Dana Desa yang berasal dari APBN diperuntukkan setiap desa di Indonesia sebanyak 74,093 desa (Rupiah), dan ε Error term.

Teknik Analisis Data

Ada tiga pendekatan untuk menganalisis data panel yakni 1) *Common Effect*, Common ini sama saja dengan metode OLS (Regresi Biasa). Intinya, intersep dan slopenya tetap antar waktu dan individu 2) *Fix Effect*, dalam *Fixed Effect*, slopenya tetap tetapi intersepnya yang berbeda antar individu. dan 3) *Random Effect*, intersep dianggap sebagai variabel acak/random yang punya nilai rata-rata. Berdasarkan hasil uji Hausman, model yang tepat digunakan untuk persamaan, yaitu ketimpangan distribusi pendapatan melalui pendekatan *Fix Effect Model*, dengan melakukan pembobotan melalui *coefficient covariance white cross section method*.

Selanjutnya sebelum dilakukan pengujian statistik maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yaitu, 1) Uji Multikolinieritas ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). 2) Uji Heteroskedastisitas. Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya, 3) Uji Autokorelasi, Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW).

Pengujian selanjutnya adalah dengan melihat nilai (R^2) semakin mendekati satu, maka model yang digunakan cukup baik karena variasi perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel independen, dan sebaliknya. Nilai F-test, F-test selain digunakan untuk melihat signifikansi parameter variabel independen terhadap

variabel dependen secara bersama-sama juga digunakan untuk melihat *goodness of fit* suatu model. Disamping melakukan uji secara statistik, yaitu t-test (untuk uji parsial). t-test digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan antara nilai t-test dengan nilai t-tabel, hal tersebut akan diketahui. Kaidah pengujian dirumuskan sebagai berikut: $H_0 = \beta_1 = 0$ dan $H_a = \beta_1 \neq 0$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Ketimpangan merupakan problem sosial ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yang memerlukan perhatian yang lebih serius untuk ditanggulangi. Sudah cukup banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Apalagi kecenderungan pemerintah model kebijakan yang ditempuh masih lebih mengedepankan efisiensi ketimbang mendorong pembangunan yang memiliki dampak terhadap perbaikan ketimpangan.

Untuk Mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan setidaknya perbaikan pengeluaran pemerintah maupun transfer antar tingkat pemerintah akan memperbaiki keadaan tersebut, sekalipun banyak fakta menunjukkan masih terjadi perdebatan antar ahli, serta temuan empiris baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri berbeda. Dan salah satu faktor penting diyakini untuk dapat mengurai persoalan ketimpangan distribusi pendapatan (desa-kota) adalah perlunya ADD, sebab sangat nampak bahwa ketimpangan desa-kota serta kondisi perdesaan yang tertinggal mengakibatkan wilayah ini menyumbang banyak angka kemiskinan disuatu provinsi. Oleh sebab itu ADD dalam *roadmap* pemerintah setiap tahunnya akan ditingkat, adapun perkembangan transfer ADD dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015-2019

Uraian	2015		2016	2017	2018	2019
	APBN	APBN-P	APBN	APBN	APBN	APBN
Transfer ke Daerah	637.875,10	643.834,60	723.191,20	811.843,70	1.037.911,60	1.118.401,70
% Dana Desa	1,42%	3,23%	6,40%	10%	10%	10%
Dana Desa (Miliar)	9.066,20	20.766,20	46.982,10	81.184,30	103.791,10	111.840,20
Rata-rata per desa (juta)	122,4	280,3	628,5	1.095,70	1.400,80	1.509,50
Alokasi Dana Desa (Miliar)	33.430,80	32.666,40	36.723,90	42.285,90	55.939,80	60.278,00
Bagi Hasil PDRD (Miliar)	2.091,10	2.091,00	2.650,40	2.733,80	3.055,30	3.376,70
Total (DD+ADD+BH+PDRD)	44.589	55.523,60	86.356,40	126.204,20	162.786,30	175.494,90
Rata-rata per desa (juta)	601,8	749,4	1.115,20	1.703,30	2.197,10	2.368,60

Sumber : Kebijakan Dana Desa TA 2016 oleh DJPK Kemenkeu RI,2016

Keterangan:

1. Alokasi Transfer ke Daerah TA 2017-2019 berdasarkan Medium-Term Budget Framework
2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 434 kab/kota.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang memiliki Desa.
4. Jumlah Desa pada tahun 2015 sebanyak 74.093 dan berdasarkan data dari Kemendagri (Permendagri No.56/2015) naik sebanyak 661 desa sehingga pada tahun 2016 sebanyak 74.754 Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019 tidak bertambah.

Selanjutnya model pendekatan yang diestimasi adalah faktor-faktor pertumbuhan ekonomi (Growth), Jumlah Populasi (Pop), Kemiskinan (Pov), Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Tingkat Pengangguran (Unemp), dan Dana Desa (DD) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Ineq). Alat analisis yang digunakan adalah ekonometrika melalui pendekatan panel data, kemudian pemilihan teknik dalam pengolahan data panel dilakukan pengujian statistik melalui uji Hausman. Hasil uji hausman menunjukkan dimana p-value sebesar 0,12710 lebih besar dari 5 % dapat disimpulkan bahwa model efek tetap (*fix effect*) lebih baik dibanding dengan model efek random (*random effect*).

Langkah selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik, yakni multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pengujian multikolinieritas menggunakan VIF, jika nilai VIF semakin membesar maka diduga ada multikolonieritas, *rule of thumbs* tidak melebihi angka 10. Dari perhitungan VIF, didapatkan nilai sebesar 1,96 lebih kecil dari 10 sehingga diduga tidak ada multikolonieritas. Sedangkan pengujian heteroskedastisitas

menggunakan metode Glesjer karena lebih sederhana dan mudah dilakukan, hasil pengujian menunjukkan bahwa F-stat sebesar -1,88 dengan demikian lebih kecil dari F-tabel sehingga diduga tidak ada heteroskedastisitas. Untuk pengujian autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson, apabila d berada diantara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada autokorelasi dan bila d ada diantara 0 hingga 1,10 dapat disimpulkan bahwa data mengandung autokorelasi positif. Hasil perhitungan menunjukkan nilai DW sebesar 1,995 dengan demikian berada diantara 1,54 dan 2,46 berarti diduga tidak ada autokorelasi.

Pengujian secara serempak menunjukkan bahwa kebijakan transfer Dana Desa berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan perdesaan di Indonesia, dan perubahan koefisien determinasi menunjukkan bahwa model ini mampu dijelaskan sebesar 99,66 persen, dan selebihnya dijelaskan variabel yang tidak termasuk dalam persamaan yang disusun. Selanjutnya, dilakukan evaluasi model dengan kriteria ekonomi terlihat tanda dan besaran nilai koefisien dari variabel bebas, dan nampak bahwa tidak semua arah koefisien sesuai teori. Hasil estimasi parameter-parameter dapat disimak pada tabel 2.

Tabel 2: Ringkasan Hasil Estimasi Persamaan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Variabel	Koefisien	t-Stat
Ineq	-	-
C	-5.978002	-4.036060
Growth	-0.000197	-0.282991
LnPop	0.319795	3.901678***
Pov	-0.001331	-1.333742
HDI	0.029762	4.324015***
Unemp	0.003290	3.618162***
LnDD	-0.030194	-4.442512***
Adj. R-Squared	0.996605	
F – Stat	503.0747	
DW- Stat	1.995344	

Keterangan : Signifikan *) 10 %, **) 5 % dan ***) 1 %.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan Menggunakan Eviews 9 (2017)

Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi model persamaan menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, berbeda dengan yang dikemukakan oleh Bourguignon (2004) dimana pertumbuhan dapat mempengaruhi ketimpangan atau keduanya berhubungan satu sama lain. Sementara jumlah penduduk atau faktor demografi disetiap provinsi berpengaruh

positif, bilamana terjadi pertambahan jumlah penduduk sebesar 10 persen akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Arham (2014b) bahwa dengan kenaikan jumlah populasi menciptakan ketimpangan. Jumlah penduduk yang bertambah asumsinya tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan produktifitas relatif rendah. Selain itu beberapa ekonom mengasumsikan bahwa pertambahan jumlah penduduk cenderung meningkatkan ketimpangan karena akan bertambah pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang publik, ketersediaan barang publik lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Sejalan dengan itu, ketimpangan meningkat karena faktor demografi tidak lain karena struktur ekonomi sektor pertanian dominan memberi kontribusi rata-rata diatas 50 persen. Namun produktifitasnya rendah luas lahan pertanian makin menyusut, pada saat yang bersamaan sebagian besar lahan pertanian dikuasai oleh korporasi dan oligarki ekonomi. Tidak kalah krusialnya, dilihat dari sisi peranan sektor pertanian cenderung menurun dan sektor industri meningkat. Sekilas tergambar transformasi struktur ekonomi di Indonesia telah berjalan, tetapi yang terjadi transformasi ekonomi semu sebab pekerja masih tetap lebih besar disektor pertanian.

Variabel kemiskinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan, pengalaman di sebagian negara menunjukkan bahwa negara yang menghasilkan PDB besar, pendapatan per kapita yang tinggi, dan distribusi pendapatan relatif merata. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, jika terjadi kenaikan IPM setiap tahun akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, terutama diperdesaan. Hasil ini merupakan hal yang tidak diharapkan, idealnya peningkatan indeks pembangunan manusia justru menekan ketimpangan. Meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan karena peningkatan IPM sebagai dampak dari kesenjangan pendidikan dan kesehatan. Menurut Yusuf, Andrew dan Irlan (2013), kesenjangan dalam pendidikan antara kaum miskin dan kaya belum berkurang, terutama dalam kesempatan mengakses pendidikan yang menjamin kehidupan yang lebih baik seperti pendidikan tinggi. Dari segi kesehatan, situasi yang serupa juga terjadi. Akses terhadap air bersih mengalami peningkatan yang lebih cepat untuk rumah tangga berpenghasilan tinggi, lebih lambat untuk rumah tangga yang pendapatan rendah, sehingga mustahil untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Ketidaksetaraan kesempatan merupakan faktor mendasar terjadinya ketimpangan pendapatan dan hasil pembangunan.

Sementara angka pengangguran di setiap provinsi berpengaruh positif, artinya bahwa setiap terjadi kenaikan angka pengangguran akan mengakibatkan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk variabel Dana Desa berpengaruh negatif, bila terjadi penambahan transfer Dana Desa sebesar 10 persen untuk setiap provinsi akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan perdesaan setiap provinsi. Hasil empiris ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di Indonesia yang dilakukan oleh Widhiyanto (2008b), Suwanan dan Sulistiani (2009b) bahwa dana transfer fiskal dapat mengurangi ketimpangan. Berbeda halnya penelitian besaran alokasi transfer fiskal tujuan khusus (DAK) tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan pembangunan nasional (Wibowo, Dendi dan Zulhanif, 2011), termasuk perbaikan ketimpangan (Huang dan Chen, 2012b). Dengan demikian meningkatnya transfer Dana Desa memberikan peluang bagi pemerintah desa menambah belanja untuk kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan itu sendiri. Dengan belanja yang tepat sasaran dipastikan pendapatan masyarakat desa meningkat, dan akan mengurangi tingkat ketimpangan (Siddiqui dan Malik, 2011), (Crudu, 2015).

Agar pemanfaatan dana desa berjalan optimal tentu diperlukan perencanaan yang baik, desa tidak boleh dipandang semata sebagai unit wilayah administrasi terendah dalam hierarki pemerintahan, desa harus dipandang sebagai bagian integrasi perencanaan yang saling memiliki keterkaitan terhadap perencanaan disekitar atau di atasnya. Disinilah pentingnya sinergitas perencanaan dan penganggaran agar tidak saling tumpang tindih antara level pemerintahan dalam membiayai suatu kegiatan yang ada diperdesaan, sehingga pemanfaatan anggaran secara efisien untuk mengurangi ketimpangan dapat terwujud dengan cepat.

Selanjutnya studi ini disadari masih terdapat kekurangan, diantaranya tidak dieksplorasi secara mendalam tentang potensi kebocoran Dana Desa yang dapat menghambat pembangunan perdesaan. Apalagi saat ini sudah ada ratusan kepala desa tersangkut masalah hukum karena adanya penyelewengan Dana Desa, dan triliunan rupiah Dana Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain itu variabel Dana Desa semestinya juga penting dilihat efeknya terhadap kemiskinan diperdesaan, sebab bilamana dibandingkan kemiskinan perkotaan dan kemiskinan perdesaan lebih tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil estimasi model dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan;

1. Model kebijakan fiskal yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini transfer Dana Desa dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Kebijakan ini tentu sesuai diharapkan sebab selama puluhan tahun wilayah perdesaan perhatian pemerintah minim dalam hal pembiayaan maka ketimpangan antar kota-desa makin melebar sehingga memicu urbanisasi. Pada akhirnya beban kota semakin berat, biaya pembangunan konstruksi makin mahal dan menambah kemacetan.
2. Pertumbuhan populasi, Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran diseluruh provinsi mendorong ketimpangan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk diseluruh provinsi meningkatkan usia produktif yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja terutama diwilayah perdesaan karena lemahnya pergeseran struktur ekonomi yang tetap didominasi sektor pertanian, pada akhirnya menciptakan pengangguran dan berdampak terhadap distribusi pendapatan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Transfer Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan maka pemerintah pusat perlu konsisten meningkatkan Dana Desa sesuai dengan peta jalan yang telah disusun dan bagian dari nawacita pemerintahan yakni membangun dari desa. Sejalan dengan itu pemerintah provinsi dan kabupaten hendaknya terus meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan melakukan sinkronisasi perencanaan ditingkat desa, kabupaten dan provinsi sehingga kegiatan pembangunan diperdesaan pembiayaannya tidak *overlapping* agar anggaran lebih efisien dimanfaatkan untuk memperbaiki ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Pemerintah perlu melakukan revisi peraturan tentang pengalokasian Dana Desa, sebab alokasi dasar yang dibagi ratakan ke seluruh desa terlalu besar, sementara alokasi proporsional yang didasarkan pada variabel demografi dan geografi relatif kecil. Hal ini akan menimbulkan persoalan ketimpangan baru antar desa dalam satu kabupaten atau antar desa intra provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Akita, T (2003) Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia Using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method. *The Annals of Regional Science*, 37: 55 - 77.
2. Arham, M. A. (2014) Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14: 145 – 167.
3. Azwar, A. H., Masbar, R., & Syahnur, S (2013) Economic Growth Disparity Among the Regions in Aceh, Indonesia. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 2: 21 – 31.
4. Badan Pusat Statistik (BPS), 2016, Ringkasan Berita Statistika. Jakarta.
5. Bonet, J (2006) Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from Colombia Experience. *The Annals of Regional Science*, 40: 661 - 676.
6. Bourguignon, F (2004). Poverty-Growth-Inequality Triangle. Paper was presented at Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi, on February 4, 2004.
7. Checerita, C., Nickel, C., & Rother, P., (2009) The Role of Fiscal Transfers for Regional Economic Convergence in Europe, Working Paper Series 1029, European Central Bank. (Diakses pada tanggal 17 Juli 2017)
8. Crudu, R (2015). The Influence of Fiscal Policy on Income Inequality in European Union's Member States. *Ekonomika Business Systems and Economics*, 5: 46- 60.
9. Esteban, J. & Ray, D (2006). Inequality, Lobbying, and Resource Allocation. *The American Review*, 9: 259 – 279.
10. Huang, B. & Chen, K (2012). Are Intergovernmental Transfers in China Equalizing?. *China Economic Review*, 23: 534 – 551.
11. Kim, E. & Samudro, N (2017) The Impact of Intergovernmental Transfer Funds on Interregional Income Disparity in Indonesia. *International Journal of Urban Sciences*, 21: 22 – 40.
12. Lessmann, C (2009). Fiscal Decentralisation and Regional Disparity; Evidence from Cross-Section and Panel Data. *Journal Environment and Planing*, 41: 2455 – 2473.

13. Liu, Y., Martinez-Vazquez, J., & Wu, A (2014). Fiscal Decentralization, Equalization, and Intra-Provincial Inequality in China. International Center for Public Policy Working Paper 14-32, icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp1432.pdf (Diakses pada tanggal 25 April 2017)
14. Munoz, A. F., Radics, G. A. & Bone, C (2010) Subnational Fiscal Disparities and Intergovernmental Transfers in LAC. Working Paper, Manuscript 1705. www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/.../16-4-2.pdf (Diakses pada Tanggal 25 April 2017).
15. Nugrahanto, A.S. & Muhyiddin (2008). Fiscal Decentralization and Regional Inequality in Indonesia 2001 – 2004. *Journal of Development Planning*, 14: 1 – 19.
16. Siddiqui, M. & Malik, A. (2011). Impact of government expenditure on income distribution a theroticle analysis in the case Pakistan. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1: 87 – 92.
17. Suwanan, A. F. & Sulistiani, E. H. (2009) Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia; A Dynamic Panel Data Evidence. *Journal of Indonesian Economy dan Business*, 24: 328 – 336.
18. Waluyo, J., (2007) Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia, UI – Depok, Makalah Panel Discussion, 12 Desember.
19. Wardana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wobowo, K (2013) Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 15: 111 – 118.
20. Wibowo, K., Dendi, A. & Zulhanif (2001). Is a Specific Grant Really "Specific"?: Case of Indonesian Provinces, 2003 – 2010. No 201109, Working Papers in Economics and Development Studies (WoPEDS) from Department of Economics, Padjadjaran University.
21. Widhiyanto, I (2008) Fiscal Desentralization and Indonesia Regional Income Disparity (1994-2004). *Jurnal Keuangan Publik*, 5: 19 – 53.

22. Yeeles, A (2015) Intergovernmental Fiscal Transfers and Geographical Disparities in Local Government Income in the Philippines. *Journal of Southeast Asian Economic (JSEAE)*, 32: 390 - 401.
23. Yusuf, A. A., Andrew, S. & Irlan A. R (2013). Long-Run Evolution of Inequality in Indonesia, (WoPEDS) 2013XX, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran. Bandung.
24. Zhang, X (2006). Fiscal Decentralization and Political Centralization in China: Implications for Growth and Inequality. *Journal of Comparative Economics*, 34: 713 – 726.